

## BAB V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi perusahaan kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir di Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat disimpulkan :

1. Komponen biaya sertifikasi ISPO PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir terdiri dari sejumlah biaya yang harus dipenuhi perusahaan dalam proses pengurusan mendapatkan sertifikat ISPO dan biaya-biaya dalam menerapkan prinsip kriteria sertifikasi ISPO. Persentase jumlah komponen biaya penerapan prinsip kriteria sertifikasi ISPO lebih besar yaitu 83,20 % dari biaya pengurusan untuk mendapatkan sertifikat ISPO yaitu 1,95 %. Secara total biaya pada saat sesudah memperoleh sertifikasi ISPO lebih kecil persentasenya yaitu 1,80 % dibandingkan biaya pada saat sebelum mendapat sertifikat ISPO yaitu 98,20 %, karena sebahagian besar telah dipenuhi PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir sebelum penerapan sertifikasi ISPO.
2. Penerapan sertifikasi ISPO pada PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir berpengaruh terhadap peningkatan biaya produksi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata biaya produksi per hektar pada saat sesudah sertifikasi ISPO lebih tinggi 23,36 % dibandingkan pada saat sebelum sertifikasi ISPO.
3. Manfaat langsung dan tidak langsung penerapan sertifikasi ISPO pada PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir sebagai berikut :
  - a. Manfaat langsung yang diterima sesudah penerapan sertifikasi ISPO pada PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir, tingkat penerimaan dari penjualan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan, pada saat sesudah ISPO dibandingkan sebelum ISPO lebih besar/lebih tinggi : rata-rata tingkat produktivitas TBS 3,36 %; rata-rata harga jual CPO dan Inti Sawit 10,46 %; rata-rata penerimaan per Kg penjualan CPO 52,36 % dan Inti Sawit 15,29 %; serta rata-rata tingkat pendapatan per Kg (3,92 %).

- b. Manfaat tidak langsung sertifikasi ISPO PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir berpengaruh terhadap aspek operasional, hubungan masyarakat sosial, kepedulian terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan ISPO berpengaruh terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian kegiatan operasional; terkelolanya pemeliharaan tanaman dan sistem penerimaan tenaga kerja; meminimalisir kasus kebakaran, angka kecelakaan kerja, kejadian pencurian TBS; penanganan permasalahan konflik dengan masyarakat; hubungan dengan pemerintah, tenaga kerja, masyarakat dan pembeli; terkelolanya dampak penurunan kualitas air, kualitas udara dan kebisingan, pengolahan limbah B3; penghargaan peringkat biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan.
- c. Penerapan sertifikasi ISPO pada PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir secara finansial telah efisien atas biaya yang dikeluarkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai R/C ratio adalah lebih besar dari 1 (satu).
4. Manfaat jangka pendek dan jangka panjang penerapan sertifikasi ISPO pada PT. Perkebunan Nusantara VI Ophir sebagai berikut :
  - a. Manfaat ISPO jangka pendek, diharapkan perusahaan memperoleh manfaat terhadap peningkatan produksi, rendemen, harga jual, tingkat penjualan dan jangkauan pasar lebih luas, serta pendapatan perusahaan.
  - b. Manfaat ISPO jangka panjang, diharapkan dengan sertifikasi ISPO, produk CPO yang diproduksi memiliki kualitas dan mutu yang lebih unggul serta berwawasan lingkungan sehingga mampu menepis isu negatif pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan memenuhi permintaan pasar akan CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*)

## B. Saran

### ❖ Bagi Perusahaan Perkebunan, Selaku Pelaku Usaha.

1. Perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu hasil produksi yang lebih unggul sehingga dapat meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia.
2. Perusahaan diharapkan agar tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam memproduksi minyak kelapa sawit agar menghasilkan produk-produk yang lestari dan ramah lingkungan.

3. Perusahaan diharapkan melakukan upaya-upaya seperti memisahkan produk CPO yang bersertifikasi dengan non sertifikasi ISPO, meningkatkan manajemen sistem pemasaran, melakukan promosi penjualan sehingga jangkauan pasar yang diminati lebih luas.

❖ **Bagi Pemerintah, Selaku Penentu Kebijakan.**

1. Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya harus lebih bekerja keras mencari pokok permasalahan dan solusi terkait dengan lambatnya implementasi sertifikasi ISPO oleh pelaku usaha perkebunan.
2. Pemerintah dirasa perlu meningkatkan pedoman peraturan perundang-undangan tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang lebih tinggi dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden.
3. Pemerintah harus dapat merumuskan dan mencari alternatif pembiayaan sertifikasi ISPO agar biaya pengurusan mendapatkan sertifikasi ISPO tidaklah terlalu besar, terutama bagi pekebun plasma/swadaya.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan penyempurnaan mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Terkait prosedur sertifikasi ISPO, pelaksanaan sertifikasi ISPO sebaiknya dilakukan sepenuhnya secara independen oleh lembaga sertifikasi ISPO.
5. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan substansi prinsip, kriteria, dan indikator sertifikasi ISPO sehingga tidak hanya memenuhi standar nasional Indonesia, tetapi juga standar yang berlaku secara internasional.
6. Pemerintah dirasa perlu memberikan kompensasi CPO yang dihasilkan perusahaan perkebunan sesudah bersertifikat ISPO. Diharapkan, ada perbedaan antara harga yang telah bersertifikat dan yang belum.

❖ **Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Perlu diadakan penelitian selanjutnya terkait sertifikasi ISPO, baik di perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kebun swadaya masyarakat.
- b. Perlu diadakan penelitian selanjutnya mengenai manfaat dan biaya pelaksanaan ISPO setelah masa berlaku periode sertifikasi berakhir, sebab dari hasil auditlah terlihat bagaimana analisis biaya dan manfaat yang diperoleh suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit dari penerapan sertifikasi ISPO.